

BB. KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
KOTA PAYAKUMBUH**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi sebagai gambaran berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun bersangkutan.

Kami telah berupaya untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan yang kita inginkan, di mana masih saja terdapat kekurangan.

Untuk kesempurnaannya kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari terciptanya Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025–2029 yang sesuai dengan ketentuan atau petunjuk pembuatan.

Payakumbuh, 19 September 2025

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



JHONNY PARLIN, S.STP,M.Si.

NIP.19790815 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel..... iv

Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 8

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah..... 8

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 8

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 14

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 29

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 29

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah..... 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 33

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 33

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 34

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 38

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 43

4.1 Uraian Program..... 43

4.2 Uraian Kegiatan..... 44

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif..... 47

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 73

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 73

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

	Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci	
	(IKK).....	65
BAB V	PENUTUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon.....	15
Tabel 2.4	Jumlah ASN Kec.Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.5	Aset Kecamatan Payakumbuh Utama.....	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
Tabel 2.8	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	38
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	39
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara.....	41
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	48
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	59
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	73
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	74
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Lainnya Perangkat Daerah.....	74
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara..... 13

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh
Utara..... 14

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah..... 35

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra Perangkat Daerah..... 36

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah..... 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun mengacu pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kota Payakumbuh.

Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Payakumbuh dengan Kecamatan Payakumbuh Utara, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan

pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Materi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 2029 dan Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 050.13/20/Bappeda-Ko/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pergantian Kepala Daerah;
2. Penyesuaian Rencana Pembangunan Daerah terhadap Perkembangan Situasi Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
3. Penyesuaian dengan arah kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah;
4. Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dan Kualitas Layanan Publik;
5. Partisipasi Masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025 2029 disusun berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya melahirkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan rencana program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode yang lalu serta memperhatikan pula isu-isu strategis, baik tingkat global, regional maupun nasional guna mencapai sasaran pembangunan Kota Payakumbuh dan khususnya Kecamatan Payakumbuh Utara.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 –

- 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 71);
25. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

Selain peraturan-peraturan diatas, dalam penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama kurun waktu tahun 2025 2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu

Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Payakumbuh Utara;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Payakumbuh Utara yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran umum pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Utara.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahannya, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh yang pembentukannya seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Payakumbuh yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah, pada pasal 3 ayat 1(f) menyebutkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan Kecamatan Tipe A yang berada di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian diubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik wilayah kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Sedangkan uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

- ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Walikota;
 - e. Mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - h. Membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan dan Alokasi Dana Kelurahan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Camat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Sekretaris adalah :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Mengkoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;

- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan administrasi keuangan oleh kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan;
- j. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan;
- k. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
- l. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk membantu Camat dalam pengelolaan Kelurahan, maka Camat dibantu oleh Lurah. Tugas Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Lurah adalah :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
- e. Pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan, alokasi dana kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Payakumbuh Utara didukung oleh perangkat daerah sebagai unsur organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat

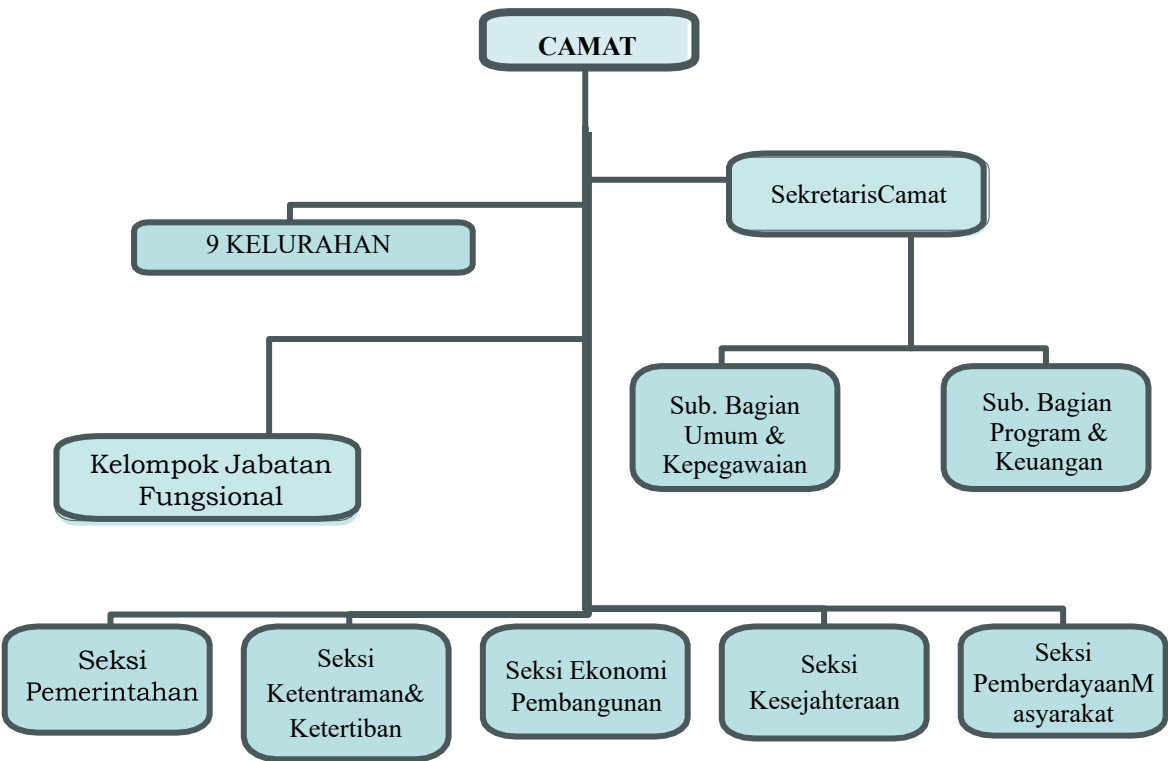
Sekretaris Camat membawahi sub bagian sebagai berikut :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Program dan Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Seksi Ekonomi Pembangunan
- 7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 8. Kelurahan
- 9. Jabatan Fungsional

Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Camat, 5 (lima) kepala seksi, dan 2 (dua) kepala sub bagian di bawah sekretariat.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara



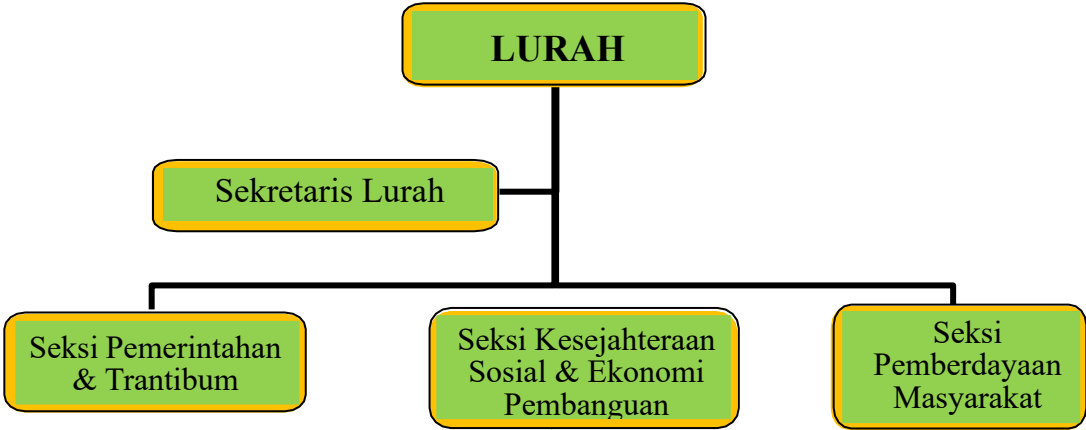
Dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari camat dibantu oleh para lurah yang memimpin 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu :

1. Kelurahan Balai Tengah Koto
2. Kelurahan Ikua Koto Dibalai
3. Kelurahan Kapalo Koto Dibalai
4. Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo
5. Kelurahan Ompang Tanah Sirah
6. Kelurahan Napar
7. Kelurahan Tigo Koto Diate
8. Kelurahan Tigo Koto Dibuah
9. Kelurahan Taratak Padang Kampuang

Masing-masing kelurahan di atas dikelola oleh satu lurah, satu sekretaris

lurah, dan tiga kasi. Struktur organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Utara



2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Payakumbuh Utara sampai pada tahun 2025 memiliki 78 orang pegawai yang tersebar di unit organisasi kecamatan sendiri dan kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Adapun persentase jumlah pegawai di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, esselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	ASN		THL		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kecamatan	7	7	2	2	18
2.	Kel.Balai Tengah Koto	3	1	2	1	7
3.	Kel.Ikua Koto Dibalai	1	3	3	-	7
4.	Kel.Kapalo Koto Dibalai	1	3	4	-	8
5.	Kel.KotoKociak Kubu TapakRajo	1	3	3	-	7
6.	Kel.Napar	2	2	2	-	6
7.	Kel.Ompang Tanah Sirah	1	3	1	-	5
8.	Kel.Tigo Koto Diateh	1	4	2	-	7
9.	Kel.Tigo Koto Dibaruah	2	3	2	1	8
10.	Kel.Taratak Padang Kampuang	1	2	2	-	5
Total		20	31	23	4	78

Sumber : Bezeting Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2024

Dari tabel 2.1 diatas terlihat bahwa antara pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan komposisinya di dominasi oleh laki-laki. Berikutnya ditampilkan komposisi pegawai berdasarkan Golongan dan Kepangkatan yang bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Pembina Tk. I / IV b	1	-	1
2.	Pembina / IV a	4	-	4
3.	Penata Tk. I / III d	4	14	18
4.	Penata / III c	2	11	13
5.	Penata Muda Tk. I / III b	2	5	7
6.	Penata Muda / III a	1	-	1
7.	Pengatur Tk. I / II d	1	1	2
8.	Pengatur / II c	3	-	3
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-	-
10.	Pengatur Muda / II a	1	-	1
11.	Juru Tk. I / I d	-	-	-
12.	Juru / I c	-	-	-
13.	Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-
14.	Juru Muda / I a	-	-	-
15.	PPPK (Golongan VII)	1	-	1
16.	THL	23	4	27
Total		43	35	78

Sumber : Bezing Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2024

Komposisi diatas menggambarkan bahwa ASN golongan III adalah yang paling banyak di Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu berjumlah 38 orang. Berikutnya ASN golongan II berjumlah 6 orang dan ASN golongan IV berjumlah 5 orang dan terakhir ASN PPPK VII sebanyak 1 orang. Banyaknya ASN golongan III ini sangat mungkin terjadi dikarenakan prioritas rekrutmen ASN yang lebih memprioritaskan lulusan S-1 khususnya untuk lembaga lembaga teknis.

Selanjutnya untuk melihat komposisi pegawai sesuai eselon yang tersedia bisa dilihat dari tabel di bawah ini. :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Eselon

No.	Esselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Eselon III.a	1	-	1
2.	Eselon III.b	-	1	1
3.	Eselon IV.a	10	4	14
4.	Eselon IV.b	3	25	28
5.	Non Eselon	6	1	7
6.	THL	23	4	27
Total		43	35	78

Sumber : Bezeting Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2024

Komposisi ASN yang ditampilkan oleh tabel diatas berdasarkan pada jumlah eselon yang disediakan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dimana sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2016, Payakumbuh Utara masuk dalam Kecamatan Tipe A sehingga untuk penentuan jabatan di setiap eselon sudah disesuaikan dengan tipe kecamatan yang ada.

Terakhir untuk melihat SDM di Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan latar belakang pendidikannya bisa dgambarkan dari tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Jumlah ASN Kec.Payakumbuh Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Strata – 3	-	-	-
2.	Strata – 2	6	1	7
3.	Strata – 1 / Diploma IV	7	20	27
4.	Diploma III	3	8	9
5.	SLTA	5	2	7
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
8.	THL	23	4	-
Total		43	35	78

Sumber : Bezeting Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara kondisi Desember Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 diatas bisa terlihat jelas bahwa ASN yang berlatar belakang pendidikan terbanyak adalah tamatan Strata-2 berjumlah 7 orang, serta Strata-1/Diploma IV berjumlah 27 orang. Berikutnya disusul tamatan SLTA berjumlah 7 orang dan tamatan Diploma III berjumlah 9 orang. Bisa dikatakan tamatan Strata-1/Diploma IV yang paling mewarnai kegiatan operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis maupun non teknis yang begitu beragam maka sudah semestinya sinergi dari seluruh komponen yang ada bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, menjalankan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, serta menyelenggarakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber Daya Modal (Aset)

Selain personil yang cakap dan memadai, sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara.

Untuk saat ini kondisi aset di Kecamatan Payakumbuh Utara bisa dilihat dari data berikut ini :

Tabel 2.5. Asset Kecamatan Payakumbuh Utara

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	
		Persil	Jumlah
1	2	3	4
1.	Tanah	34	13.893
2.	Alat Besar	-	3
3.	Alat Angkutan	-	74
4.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	7
5.	Alat Pertanian	-	6
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	942
7.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	3
8.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	3
9.	Komputer	-	178
10.	Bangunan Gedung	29	3.817
11.	Jalan dan Jembatan	-	1.500
12.	Instalasi	-	2.133
13.	Jaringan	-	7.020
14.	Bahan Perpustakaan	-	7
15.	Aset Lain-lain	-	1

Sumber : Laporan Aset kondisi 31 Desember 2024.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara adalah penilaian terhadap capaian kinerja pelayanan tahun 2020-2024. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja pelayanan adalah indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029.

Adapun bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara kepada masyarakat maupun stakeholder antara lain meliputi :

1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan pembinaan kanagarian.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
3. Pembinaan pembangunan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan sosial
4. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketata usahaan dan rumah tangga
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di kecamatan.

Dari uraian ini ada beberapa kondisi yang diharapkan akan muncul dalam dekade 5 tahun kedepan pada Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, yang didukung oleh kualitas dan kuantitatif aparatur yang memadai.
2. Peningkatan dan peremajaan sarana dan prasarana pelayanan
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan terpadu terhadap usaha ekonomi produktif.
4. Peningkatan koordinasi dengan Cabang Dinas dan UPTD di Kecamatan serta pemerintah kota beserta jajarannya.
5. Legalisasi tingkat Kota terhadap dokumen SOP dan SPM untuk menjamin berjalanannya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum dalam mensukseskan program PATEN.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2023-2026 dapat dilihat dari tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	IKM Kecamatan	-	-	-	89,00	90,00	91	91	91	89,05	90,08	91,19	91,31	91,82	100,05%	100,08%	100,2%	100,3%	100,9%
2	Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	BB	A	A	100%	100%	97,7%	100%	100%
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara berhasil direalisasikan dengan efektif. Berikut ini beberapa point penting dari analisis :

1. IKM Kecamatan terus meningkat dari 89,05 pada tahun 2020 menjadi 91,82 di tahun 2024, dengan capaian yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Hasil penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat, selama tahun 2020 sampai dengan 2024 hanya mengalami satu kali penurunan pada tahun 2023 dengan capaian Nilai BB dari target Nilai A. Hal ini memberikan cerminan yang baik atas akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
3. Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, menunjukkan capaian realisasi sesuai target yang diharapkan, hal ini menunjukkan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Payakumbuh Utara berperan aktif dalam pelaksanaan program kegiatan kemasyarakatan dengan optimal. Dimana untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa unsur diantaranya seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, adanya Struktur Organisasi, keterlibatan dan kehadiran pengurus dan anggota dalam setiap kegiatan di masyarakat, serta peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.
4. Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti, menunjukkan capaian yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan pengaduan masyarakat dari tingkat kelurahan sampai kecamatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penilaian terhadap pencapaian kinerja tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan secara keseluruhan, Kecamatan Payakumbuh Utara telah

berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya.

Berikut pencapaian kinerja anggaran Kecamatan Payakumbuh Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat dari tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Payakumbuh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	830.262.601	-	-	-	-	772.686.400	-	-	-	-	93,07	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.220.000	-	-	-	-	8.103.000	-	-	-	-	98,58	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	75.590.000	-	-	-	-	70.373.134	-	-	-	-	93,10	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	5.600.000	-	-	-	-	5.529.000	-	-	-	-	98,73	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	245.943.776	-	-	-	-	213.567.776	-	-	-	-	86,84	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	7.152.886	-	-	-	-	6.654.700	-	-	-	-	93,04	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.941.750	-	-	-	-	9.858.750	-	-	-	-	99,17	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.440.750	-	-	-	-	16.240.450	-	-	-	-	98,78	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.690.765	-	-	-	-	22.661.400	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.887.350	-	-	-	-	6.687.500	-	-	-	-	97,10	-	-	-	-	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.302.142	-	-	-	-	13.150.000	-	-	-	-	98,86	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an	25.604.750	-	-	-	-	23.280.600	-	-	-	-	90,92	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	67.317.000	-	-	-	-	67.212.250	-	-	-	-	99,84	-	-	-	-	-	-
Rakor dan Konsultasi dalam / Luar Daerah	76.277.000	-	-	-	-	63.370.600	-	-	-	-	83,08	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Tenaga Adm dan teknis perkantoran	249.294.432	-	-	-	-	245.997.240	-	-	-	-	98,68	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.132.771.024	-	-	-	-	3.047.685.169	-	-	-	-	73,74	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gedung Kantor	3.801.011.294	-	-	-	-	2.727.478.419	-	-	-	-	71,76	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	187.749.000	-	-	-	-	183.600.000	-	-	-	-	97,79	-	-	-	-	-	-
Pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	143.366.730	-	-	-	-	136.446.750	-	-	-	-	95,17	-	-	-	-	-	-

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	644.000	-	-	-	-	160.000	-	-	-	-	24,84	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN	33.400.000	-	-	-	-	33.316.000	-	-	-	-	99,75	-	-	--	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.400.000	-	-	-	-	33.316.000	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.051.000	-	-	-	-	2.988.000	-	-	-	-	97,94	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.525.500	-	-	-	-	1.494.000	-	-	-	-	97,94	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	1.525.500	-	-	-	-	1.494.000	-	-	-	-	97,94	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	604.742.625	-	-	-	-	571.588.305	-	-	-	-	94,52	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	538.235.725	-	-	-	-	511.454.755	-	-	-	-	95,02	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	66.506.900	-	-	-	-	60.133.550	-	-	-	-	90,42	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP	103.726.650	-	-	-	-	97.773.400	-	-	-	-	94,26	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kehidupan Beragama	103.726.650	-	-	-	-	97.773.400	-	-	-	-	94,26	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	157.547.940	-	-	-	-	150.120.250	-	-	-	-	95,29	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa	157.547.940	-	-	-	-	150.120.250	-	-	-	-	95,29	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEWILAYAHAN	1.487.587.966	-	-	-	-	1.383.873.672	-	-	-	-	93,03	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Pelayanan Adm terpadu Kecamatan (PATEN)	16.475.508	-	-	-	-	16.389.400	-	-	-	-	99,48	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Balai Tongah Koto	104.320.305	-	-	-	-	102.843.553	-	-	-	-	98,58	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Koto Kociak kubu Tapak Rajo	108.784.694	-	-	-	-	106.666.446	-	-	-	-	98,05	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai	108.091.593	-	-	-	-	104.806.136	-	-	-	-	96,96	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Diate	122.473.446	-	-	-	-	120.845.168	-	-	-	-	98,67	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Napar	66.074.589	-	-	-	-	63.640.981	-	-	-	-	96,32	-	-	-	-	-	-

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Taratak Padang Kampuang	96.604.808	-	-	-	-	95.854.042	-	-	-	-	99,22	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ompang Tanah Sirah	114.657.257	-	-	-	-	112.861.217	-	-	-	-	98,43	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah	129.029.146	-	-	-	-	126.739.734	-	-	-	-	98,23	-	-	-	-	-	-
Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Ikua Koto Dibalai	117.037.138	-	-	-	-	116.067.395	-	-	-	-	99,17	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban	2.645.955	-	-	-	-	2.317.700	-	-	-	-	87,59	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	434.909.377	-	-	-	-	349.885.650	-	-	-	-	80,45	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	66.484.150	-	-	-	-	64.956.250	-	-	-	-	97,70	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUAN PEMERINTAAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	7.268.522.207	8.075.453.114	8.400.114.454	8.459.648.322	-	6.657.671.437	7.163.760.724	7.311.515.862	7.194.807.853	-	91,60	88,71	87,04	85,05	5,28	2,01
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	22.399.320	15.103.630	10.134.750	32.728.500	-	21.159.810	8.763.540	4.834.575	32.401.925	-	94,47	58,02	47,70	99,00	52,49	170,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7.159.640	4.827.670	5.095.650	15.945.400	-	6.467.120	4.312.520	4.834.575	15.801.475	-	90,33	89,33	94,88	99,10	61,97	64,55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	7.159.640	4.827.670	-	-	-	6.740.400	-	-	-	-	94,14	-	-	-	(44,19)	(33,33)
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	-	8.080.040	5.448.290	5.039.100	16.783.100	-	7.952.290	4.451.020	-	6.600.450	-	98,42	81,70	-	98,91	64,33	(15,01)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.445.735.473	6.737.888.815	6.626.667.094	7.119.004.102	-	5.864.728.969	5.896.883.246	5.629.130.809	5.907.186.187	-	90,99	87,52	84,95	82,98	3,44	1,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	6.445.735.473	6.737.888.815	6.274.491.094	6.813.100.102	-	5.864.728.969	5.896.883.246	5.301.716.809	5.613.078.187	-	90,99	87,52	84,50	82,39	2,08	2,11
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	352.176.000	305.904.000	-	-	-	327.414.000	294.108.000	-	-	-	92,97	96,14	(4,38)	(3,39)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	39.612.860	-	-	-	-	31.593.500	-	-	-	-	79,76	-	(33,33)	(33,33)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	39.612.860	-	-	-	-	31.593.500	-	-	-	-	79,76	-	(33,33)	(33,33)
Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	-	294.871.750	212.519.290	263.415.350	221.939.500	-	294.493.608	206.932.249	246.783.412	207.345.815	-	99,87	97,37	93,69	93,42	(6,57)	(15,17)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	6.487.490	3.134.900	8.347.530	2.317.250	-	6.476.750	3.131.000	8.347.400	2.201.000	-	99,83	99,88	100,00	94,98	14,12	(41,21)

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	35.000.000	-	-	-	-	34.804.000	-	-	-	-	99,44	-	-	-	(33,33)	(33,33)
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	-	17.250.000	-	-	-	-	16.500.000	-	-	-	-	95,65	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	114.966.900	92.353.220	120.043.650	109.283.200	-	114.873.300	91.978.650	116.064.850	98.834.100	-	99,92	99,59	96,69	90,44	0,45	(11,50)
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	21.999.930	13.983.470	21.214.330	11.875.050	-	21.976.140	13.957.400	20.597.275	11.174.550	-	99,89	99,81	97,09	94,10	(9,58)	(27,25)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	25.596.430	22.280.700	23.190.840	-	-	25.596.430	19.035.000	21.417.000	-	-	100,00	85,43	92,35	-	(36,29)	(41,84)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	90.821.000	80.767.000	90.619.000	81.214.000	-	90.766.988	78.830.199	80.356.887	78.636.165	-	99,94	97,60	88,68	96,83	(3,08)	(5,09)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	289.976.814	288.108.064	849.901.840	803.900.720	-	274.721.758	256.426.641	818.893.260	776.274.026	-	94,74	89,00	96,35	96,56	62,98	(3,22)
Penyediaan Jasa surat menyurat	-	5.155.000	1.700.000	3.368.750	1.679.000	-	4.763.000	1.700.000	3.350.000	1.460.000	-	92,40	100,00	99,44	86,96	(6,34)	(39,92)
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	74.999.512	0.460.272	74.999.920	67.591.720	-	62.463.517	50.720.053	52.174.401	52.522.686	-	83,29	63,04	69,57	77,71	(3,13)	(6,03)
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.994.430	1.984.080	4.775.200	2.012.500	-	5.561.250	.823.200	4.737.600	1.860.000	-	92,77	91,89	99,21	92,42	5,31	(42,12)
Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	-	203.827.872	203.963.712	766.757.970	732.617.500	-	201.933.991	202.183.388	758.631.259	720.431.340	-	99,07	99,13	98,94	98,34	90,51	(0,72)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	9.386.610	519.899.638	298.088.110	93.805.500	-	6.500.000	499.952.648	295.206.340	90.305.000	-	69,25	96,16	99,03	96,27	1.775,85	2.507,25
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	178.674.310	93.805.500	-	-	-	176.110.000	90.305.000	-	-	-	98,56	96,27	-	(16,24)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	-	519.899.638	119.413.800	-	-	-	499.952.648	119.096.340	-	-	-	96,16	99,73	-	-	(33,59)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	9.386.610	-	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	69,25	-	-	-	-	(33,33)
Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	206.152.240	301.933.677	312.294.450	188.270.000	-	196.067.292	294.802.400	285.073.966	181.294.900	-	95,11	97,64	91,28	96,30	3,39	4,64

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	-	144.100.000	144.100.000	272.650.000	178.000.000	-	135.239.292	138.141.250	248.676.250	172.544.900	-	93,85	95,86	91,21	96,94	18,16	(9,22)
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	20.990.000	9.060.000	38.570.000	10.270.000	-	20.926.000	8.925.400	35.386.516	8.750.000	-	99,70	98,51	91,75	85,20	65,17	(43,22)
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	1.074.450	1.074.450	-	-	-	905.000	1.011.200	-	-	-	84,23	94,11	-	-	(33,29)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	41.062.240	147.699.227	-	-	-	39.902.000	146.830.750	-	-	-	97,17	99,41	-	-	-	88,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	70.734.410	48.811.020	77.664.400	22.306.400	-	59.557.500	44.052.890	49.571.585	20.585.075	-	84,20	90,25	63,83	92,28	(14,39)	(28,13)
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	41.849.920	29.334.390	48.239.100	18.635.750	-	34.212.100	24.621.250	21.142.195	17.109.575	-	81,75	83,93	43,83	91,81	(8,94)	(15,75)
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	-	41.849.920	29.334.390	48.239.100	18.635.750	-	34.212.100	24.621.250	21.142.195	17.109.575	-	81,75	83,93	43,83	91,81	(8,94)	(15,75)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	28.884.490	19.476.630	29.425.300	3.670.650	-	25.345.400	19.431.640	28.429.390	3.475.500	-	87,75	99,77	96,62	94,68	(23,01)	(36,88)
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	28.884.490	19.476.630	29.425.300	3.670.650	-	25.345.400	19.431.640	28.429.390	3.475.500	-	87,75	99,77	96,62	94,68	(23,01)	(36,88)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	1.639.686.788	1.341.726.778	2.088.315.440	2.019.583.980	-	1.536.903.553	1.283.618.097	1.780.302.861	1.752.987.167	-	93,73	95,67	85,25	86,80	11,39	(5,88)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	93.759.910	93.456.660	99.719.750	97.714.250	-	90.806.400	90.626.850	82.774.350	93.269.245	-	96,85	96,97	83,01	95,45	1,46	4,13
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	-	93.759.910	93.456.660	99.719.750	97.714.250	-	90.806.400	90.626.850	82.774.350	93.269.245	-	96,85	96,97	83,01	95,45	1,46	4,13
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	509.077.710	344.606.670	188.595.740	121.893.650	-	440.725.860	311.601.142	149.055.035	81.873.040	-	86,57	90,42	79,03	67,17	(37,65)	(24,96)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	509.077.710	344.606.670	188.595.740	121.893.650	-	440.725.860	311.601.142	149.055.035	81.873.040	-	86,57	90,42	79,03	67,17	(37,65)	(24,96)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Balai Tengah Koto)	-	96.512.708	83.490.668	199.999.940	199.995.950	-	94.167.718	81.994.477	184.483.231	181.503.850	-	97,57	98,21	92,24	90,75	42,02	(4,43)

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	75.320.438	62.298.398	88.115.000	46.144.000	-	74.714.018	60.890.077	73.308.376	43.559.300	-	99,19	97,74	83,20	94,40	(7,83)	(19,63)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	21.192.270	21.192.270	111.884.940	153.851.950	-	19.453.700	21.104.400	111.174.855	137.944.550	-	91,80	99,59	99,37	89,66	155,15	12,28
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ikua Koto Dibalai)	-	131.129.572	115.484.512	200.000.610	200.000.410	-	129.474.995	109.436.760	161.564.100	172.860.595	-	98,74	94,76	80,78	86,43	20,42	(2,67)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	110.214.572	94.569.512	14.997.000	25.634.360	-	108.800.995	89.055.960	14.985.000	19.757.400	-	98,72	94,17	99,92	77,07	(9,14)	4,29
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	20.915.000	20.915.000	185.003.610	174.366.050	-	20.674.000	20.380.800	146.579.100	153.103.195	-	98,85	97,45	79,23	87,81	259,60	3,07
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kapalo Koto Dibalai)	-	137.623.772	121.766.072	200.000.000	199.993.810	-	132.624.770	120.742.878	177.584.450	187.558.250	-	96,37	99,16	88,79	93,78	17,57	(0,96)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	116.748.932	100.891.232	26.640.000	93.028.610	-	113.480.770	100.055.853	24.000.000	88.689.900	-	97,20	99,17	90,09	95,34	54,01	85,65
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	20.874.840	20.874.840	173.360.000	106.965.200	-	19.144.000	20.687.025	153.584.450	98.868.350	-	91,71	99,10	88,59	92,43	230,72	(7,05)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Koto Kociak Kubu Tapakrajo)	-	105.652.798	89.990.028	199.999.820	199.999.810	-	103.759.164	88.718.700	162.173.300	164.959.695	-	98,21	98,59	81,09	82,48	35,81	(3,98)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	85.051.238	69.388.468	92.692.500	25.634.360	-	84.221.164	68.850.640	64.765.000	21.883.000	-	99,02	99,22	69,87	85,37	(19,06)	(28,17)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	20.601.560	20.601.560	107.307.320	174.365.450	-	19.538.000	19.868.060	97.408.300	143.076.695	-	94,84	96,44	90,78	82,06	161,12	17,49
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Napar)	-	95.013.068	81.990.828	199.999.900	199.990.000	-	88.401.865	80.786.013	168.121.500	176.001.975	-	93,04	98,53	84,06	88,01	43,41	(0,95)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	81.431.898	68.409.858	86.776.880	45.758.750	-	76.863.165	67.305.513	75.628.000	44.338.000	-	94,39	98,39	87,15	96,90	(12,14)	(17,89)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	13.581.170	13.580.970	113.223.020	154.231.250	-	11.538.700	13.480.500	92.493.500	131.663.975	-	84,96	99,26	81,69	85,37	256,64	21,68
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Ompang Tanah Sirah)	-	96.511.168	83.487.538	199.999.870	199.999.410	-	90.073.142	78.520.248	169.113.400	184.065.535	-	93,33	94,05	84,56	92,03	42,02	(0,94)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	74.445.928	61.422.478	84.929.460	50.091.360	-	72.251.142	60.706.938	69.585.000	43.609.900	-	97,05	98,84	81,93	87,06	(6,75)	(17,72)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	22.065.240	22.065.060	115.070.410	149.908.050	-	17.822.000	17.813.310	99.528.400	140.455.635	-	80,77	80,73	86,49	93,69	150,59	15,22
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Diate)	-	137.631.102	121.986.042	200.000.000	199.999.910	-	136.170.075	118.980.107	180.316.895	182.979.072	-	98,94	97,54	90,16	91,49	17,53	(3,54)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	116.648.252	101.003.192	69.460.880	47.634.360	-	115.222.875	98.096.907	57.690.000	34.553.047	-	98,78	97,12	83,05	72,54	(25,35)	(18,46)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	20.982.850	20.982.850	130.539.120	152.365.550	-	20.947.200	20.883.200	122.626.895	148.426.025	-	99,83	99,53	93,94	97,41	179,61	8,54

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tigo Koto Dibaruah)	-	131.130.802	115.485.622	199.999.810	199.997.420	-	128.412.133	112.793.660	157.846.395	174.731.150	-	97,93	97,67	78,92	87,37	20,42	(0,36)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	110.215.762	94.570.702	36.186.760	103.271.870	-	107.796.033	92.235.860	35.700.000	88.688.000	-	97,80	97,53	98,65	85,88	36,49	44,46
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	20.915.040	20.914.920	163.813.050	96.725.550	-	20.616.100	20.557.800	122.146.395	86.043.150	-	98,57	98,29	74,56	88,96	214,09	(8,30)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taratak Padang Kampuang	-	105.644.178	89.982.138	200.000.000	199.999.360	-	102.287.431	89.417.262	187.270.205	153.184.760	-	96,82	99,37	93,64	76,59	35,81	(9,90)
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	84.199.248	68.537.208	37.550.000	37.634.360	-	81.169.31	68.004.862	34.200.000	30.516.000	-	96,40	99,22	91,08	81,09	(21,20)	(9,16)
Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	21.444.930	21.444.930	162.450.000	162.365.000	-	21.118.100	21.412.400	153.070.205	122.668.760	-	98,48	99,85	94,23	75,55	219,16	(4,11)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	723.588.653	15.345.250	29.999.100	23.171.250	-	492.078.950	12.241.730	29.102.685	23.017.400	-	68,01	79,78	97,01	99,34	(8,38)	(39,01)
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	723.588.653	15.345.250	29.999.100	23.171.250	-	492.078.950	12.241.730	29.102.685	23.017.400	-	68,01	79,78	97,01	99,34	(8,38)	(39,01)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	723.588.653	15.345.250	29.999.100	23.171.250	-	492.078.950	12.241.730	29.102.685	23.017.400	-	68,01	79,78	97,01	99,34	(8,38)	(39,01)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	146.220.840	123.398.370	154.999.900	120.926.900	-	113.315.900	115.157.729	143.351.920	119.545.800	-	77,50	93,32	92,49	98,86	(3,99)	(4,91)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	146.220.840	123.398.370	154.999.900	120.926.900	-	113.315.900	115.157.729	143.351.920	119.545.800	-	77,50	93,32	92,49	98,86	(3,99)	(4,91)
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	-	126.605.970	110.172.150	114.999.950	112.697.050	-	98.223.000	105.536.469	109.131.170	111.533.000	-	77,58	95,79	94,90	98,97	(3,53)	3,23
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	19.614.870	13.226.220	39.999.950	8.229.850	-	15.092.900	9.621.260	34.220.750	8.012.800	-	76,95	72,74	85,55	97,36	30,14	(36,76)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara, maka kelompok sasaran layanan Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain sebagai berikut:

- a. Kelurahan;
- b. Masyarakat;
- c. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Payakumbuh Utara juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan.

Ada beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan diantaranya adalah :

- a) Sumber daya aparatur yang belum mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh beberapa waktu kebelakang tidak membuka lowongan CPNS, dan juga beberapa ASN yang memasuki usia pensiun. Sehingga dengan keterbatasan personil tersebut mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan di kecamatan maupun kelurahan. Dan juga dilihat dari data kepegawaian Kecamatan Payakumbuh Utara dimana jumlah ASN saat ini hanya berjumlah 51 orang, sementara kebutuhan ASN

dengan formasi penuh berjumlah 63 orang.

- b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. Perlunya penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di kecamatan dan kelurahan. Kekurangan yang ada akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan dan kinerja kegiatan perkantoran.
 - c) Perlunya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (*Human Resources Capacity Building Need*) melalui Bimtek dan Sosialisasi yang diadakan oleh internal OPD maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain, dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
 - d) Pemahaman tupoksi yang relatif masih rendah dan belum maksimalnya penggunaan SOP berdasarkan peraturan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum khususnya dalam mensukseskan program PATEN.
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- a) Belum optimalnya penguatan pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Sedikit sekali masyarakat yang mau terlibat dalam keterlibatan kepengurusan lembaga kemasyarakatan.
 - c) Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan berbagai masalah sosial yang ada, khususnya untuk meminimalisir berbagai penyakit masyarakat (pekat) yang semakin beragam dan juga masalah-masalah kriminal atau yang menyangkut ketertiban umum pada umumnya.
3. Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Perlu dilakukan peningkatan Koordinasi Kecamatan Payakumbuh Utara dengan Dinas Instansi Vertikal maupun Horizontal dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dituntut lebih responsive, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis yang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara antara lain :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu, sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan Payakumbuh Utara yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat, Kecamatan Payakumbuh Utara melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan yang dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpengetahuan, namun hasil yang diraih belum maksimal karena keterbatasan SDM dan SDA yang ada, sehingga perlu adanya penambahan SDM yang memiliki kompetensi serta kurangnya metode atau pembaruan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.8. Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) yang aktif	Belum optimalnya pelayanan publik di kelurahan dan kecamatan		Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's): Tujuan ke-16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	Asta Cita ke-6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi ke-3 Provinsi Sumbar : Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif Lembaga kemasyarakatan		Tujuan ke-17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan			Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan					

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Payakumbuh Utara menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan kondusif”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara, dalam hal ini Kecamatan

Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Payakumbuh dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Payakumbuh Utara diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

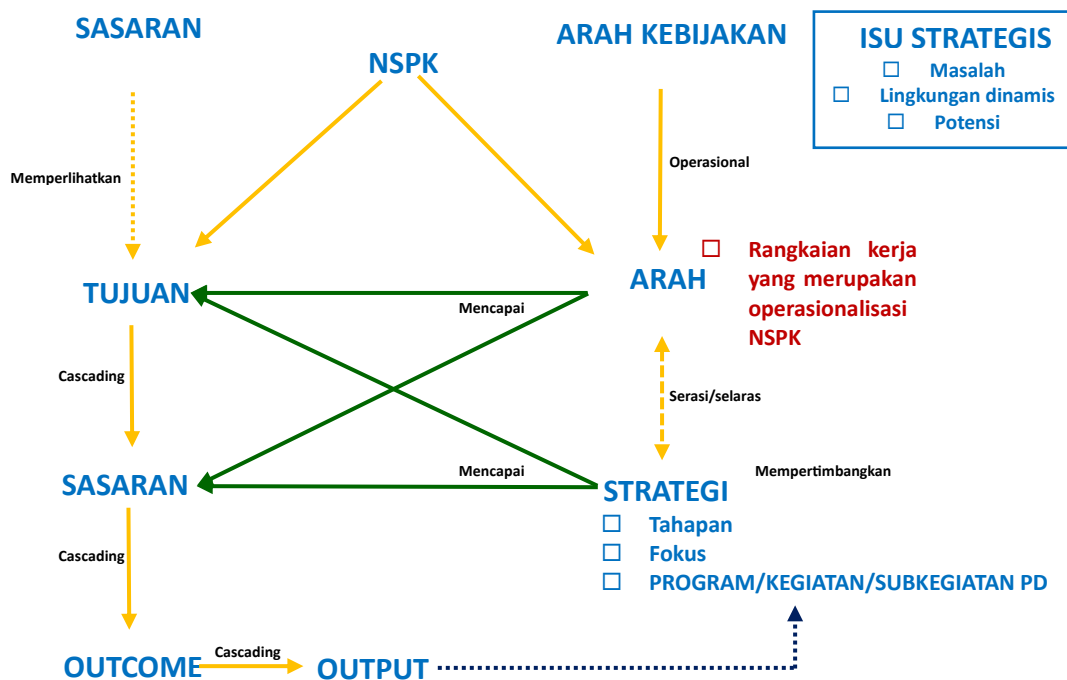
Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Renstra tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

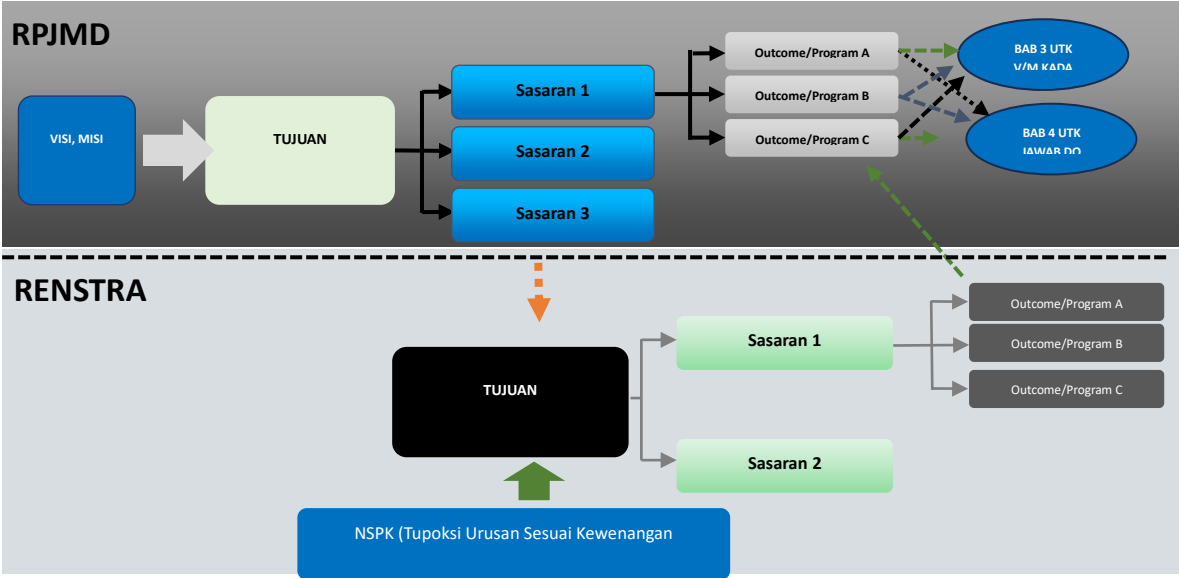


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Payakumbuh Utara yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Berikut keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Nilai IKM	91	91	91	91	91	91	
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	81	81	81	81	81	81	

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Strategi Kecamatan Payakumbuh Utara yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan standar pelayanan publik
- 2. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah
- 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Penahapan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Perbaikan kinerja layanan publik di kecamatan dan kelurahan	Pemantapan kinerja layanan publik terutama pada pemenuhan SDM yang berkualitas mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan	Peningkatan kinerja layanan publik dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang terus ditata dan semakin disempurnakan.	Pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan mampu memberikan layanan dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.	Peningkatan layanan publik yang prima

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada

setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun arah kebijakan untuk pencapaian strategi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Kualitas dan Inovasi Berkelanjutan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Government).
4. Melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan.
5. Menyediakan akses pengaduan pelayanan baik berupa kotak saran maupun saluran pengaduan
6. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).
7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan.
8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan.
9. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian tujuan.
10. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dan Indikator Kinerja individu aparatur yang terukur.
11. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan.

Keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD Kota Payakumbuh dengan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF			
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Peningkatan standar pelayanan publik	Penyeediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
			Peningkatan kualitas dan inovasi berkelanjutan

VISI : PAYAKUMBUH MAJU BERMARTABAT MELALUI PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN SENTRA UMKM YANG KOMPETITIF			
MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN KONDUSIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pemanfaatan Teknologi Informasi (E-Government)
			Melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
			Penyediaan akses pengaduan pelayanan baik berupa kotak saran maupun saluran pengaduan
			Peningkatan kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meingkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan)
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gontong royong dan swadaya masyarakat)
			Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang taruna, PKK, Posyandu)
			Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW,LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
			Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan
			Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian tujuan
			Penetapan indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dan individu aparatus yang terukur
			Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pengoptimalan layanan publik masyarakat	Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan	
2.			Peningkatan Kualitas dan Inovasi Berkelanjutan	
3.			Pemanfaatan Teknologi Informasi (E- Government)	
4.			Melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan.	
5.			Penyediaan akses pengaduan pelayanan baik berupa kotak saran maupun saluran pengaduan	
6.			Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	
7.			Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan	
8.			Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Utara dan individu aparatur yang terukur	
9.			Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan	
10.		Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	
11.			Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan	
12.		Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan)	Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Pembentukan dan penataan kelembagaan LKK, dan Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi tata kelola kelembagaan)	
13.		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat)	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan (Meningkatkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat)	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
14.		Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu)	Penguatan dukungan anggaran operasional dan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK: RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu)	
15.		Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.	Penyediaan insentif bagi petugas RT, RW, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya.	
16.		Meningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatan kolaborasi dan kemitraan dengan LKK dalam mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam pembangunan	
17.		Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan keluarga dan kelompok masyarakat pada aspek sosial, ekonomi serta politik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi Rentsra ke dalam bentuk tindakan nyata.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

4.1 Uraian Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Payakumbuh Utara ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk

menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan, peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan di wilayahnya. Program ini berupa kegiatan sinergitas dengan TNI/Polri dan tokoh-tokoh masyarakat yang bertujuan adalah menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang tidak secara spesifik ditangani oleh lembaga negara atau pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan berupa Memperkuat koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah, Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan baik dari sisi keagamaan maupun kesehatan.

4.2 Uraian Kegiatan

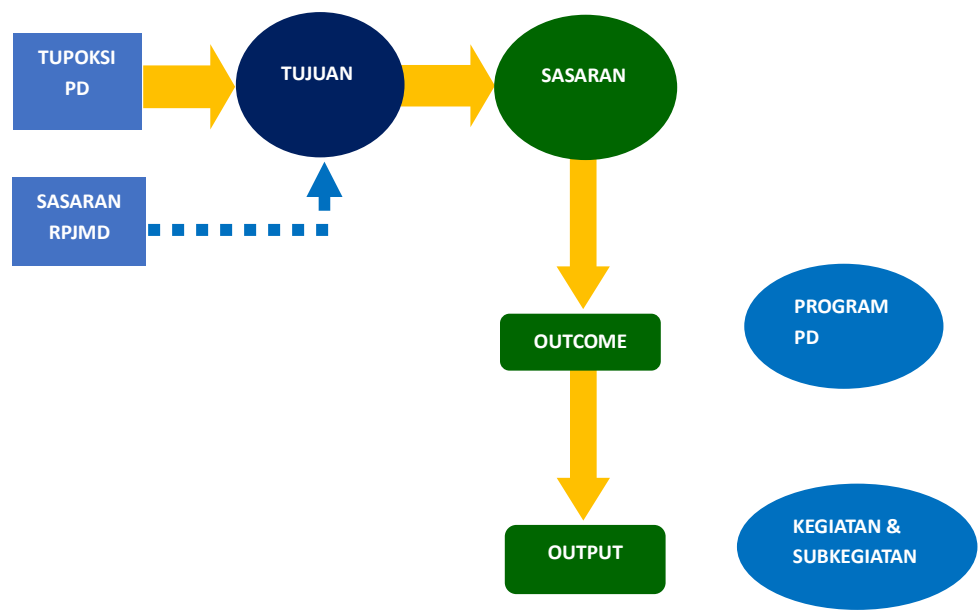
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Adminsitration Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan struktur sistematis dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Pada bagian ini akan digambarkan rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kerja serta kelompok sasaran yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Payakumbuh Utara. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payakumbuh Utara							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Nilai IKM (Indeks)		
					Nilai IKM (Indeks)		
				Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga		Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah		Nilai IKM (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Balai Tongah Koto							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Ikua Koto Dibalai							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Kapalo Koto Dibalai							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai IKM (Indeks)		
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai IKM (Indeks)		
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
			Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Napar							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai IKM (Indeks)		
		Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga			Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Ompang Tanah Sirah							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
7.01.0.00.0.00.03.0007 - Kelurahan Tigo Koto Diate							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0008 - Kelurahan Tigo Koto Dibaruah							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.03.0009 - Kelurahan Taratak Padang Kumpang							
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Nilai IKM (Indeks)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)		
					Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Nilai IKM (Indeks)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				11.186.600.777,00		15.166.154.700,00		15.266.154.700,00		15.266.154.700,00		15.266.154.700,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.098.759.554,00		11.266.867.502,00		11.170.867.502,00		11.170.867.502,00		11.170.867.502,00		
Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM	91	91	9.098.759.554,00	91	11.266.867.502,00	91	11.170.867.502,00	91	11.170.867.502,00	91	11.170.867.502,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 00 - Kecamatan Payakumbu h Utara	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.803.250,00		134.530.200,00		134.530.200,00		134.530.200,00		134.530.200,00		
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	24.803.250,00	1	134.530.200,00	1	134.530.200,00	1	134.530.200,00	1	134.530.200,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.418.650,00		46.935.300,00		46.935.300,00		46.935.300,00		46.935.300,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	14.418.650,00	2	46.935.300,00	2	46.935.300,00	2	46.935.300,00	2	46.935.300,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.969.600,00		46.329.800,00		46.329.800,00		46.329.800,00		46.329.800,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	7.969.600,00	2	46.329.800,00	2	46.329.800,00	2	46.329.800,00	2	46.329.800,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.207.500,00		20.935.300,00		20.935.300,00		20.935.300,00		20.935.300,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	1.207.500,00	1	20.935.300,00	1	20.935.300,00	1	20.935.300,00	1	20.935.300,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.207.500,00		20.329.800,00		20.329.800,00		20.329.800,00		20.329.800,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	1.207.500,00	1	20.329.800,00	1	20.329.800,00	1	20.329.800,00	1	20.329.800,00				
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.122.203.881,00		8.076.394.700,00		8.076.394.700,00		8.076.394.700,00		8.076.394.700,00				
Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	8.122.203.881,00	12	8.076.394.700,00	12	8.076.394.700,00	12	8.076.394.700,00	12	8.076.394.700,00				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	60		62		62		62		62					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.611.963.881,00		7.566.154.700,00		7.566.154.700,00		7.566.154.700,00		7.566.154.700,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	60	7.611.963.881,00	62	7.566.154.700,00	62	7.566.154.700,00	62	7.566.154.700,00	62	7.566.154.700,00				
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				510.240.000,00		510.240.000,00		510.240.000,00		510.240.000,00		510.240.000,00				
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	510.240.000,00	12	510.240.000,00	12	510.240.000,00	12	510.240.000,00	12	510.240.000,00				
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.800,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00				
Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	53	80.800,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				80.800,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00		63.000.000,00				
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	53	80.800,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00	63	63.000.000,00				
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.534.030,00		490.169.500,00		390.169.500,00		390.169.500,00		390.169.500,00				
Indeks layanan administrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	107.534.030,00	2	490.169.500,00	2	390.169.500,00	2	390.169.500,00	2	390.169.500,00				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	0		3		3		3		3					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7		7		7		7		7					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3		3		3		3		3					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1		1		1		1					
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.854.000,00		15.723.000,00		15.723.000,00		15.723.000,00		15.723.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	2.854.000,00	1	15.723.000,00	1	15.723.000,00	1	15.723.000,00	1	15.723.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	0	-	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00	3	55.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				47.430.730,00		105.318.000,00		105.318.000,00		105.318.000,00		105.318.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	7	47.430.730,00	7	105.318.000,00	7	105.318.000,00	7	105.318.000,00	7	105.318.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.989.800,00		12.744.500,00		12.744.500,00		12.744.500,00		12.744.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	5.989.800,00	2	12.744.500,00	2	12.744.500,00	2	12.744.500,00	2	12.744.500,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	-	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.052.000,00		101.384.000,00		101.384.000,00		101.384.000,00		101.384.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	50.052.000,00	3	101.384.000,00	3	101.384.000,00	3	101.384.000,00	3	101.384.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.207.500,00		150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	1.207.500,00	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				242.400,00		870.000.000,00		870.000.000,00		870.000.000,00		870.000.000,00		
Persentase ketersediaan BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	242.400,00	2	870.000.000,00	2	870.000.000,00	2	870.000.000,00	2	870.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	1		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.800,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	1	80.800,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.800,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	80.800,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.800,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	80.800,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				659.913.593,00		920.803.102,00		920.803.102,00		920.803.102,00		920.803.102,00		
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	659.913.593,00	1	920.803.102,00	1	920.803.102,00	1	920.803.102,00	1	920.803.102,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				91.522.400,00		91.522.638,00		91.522.638,00		91.522.638,00		91.522.638,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	91.522.400,00	3	91.522.638,00	3	91.522.638,00	3	91.522.638,00	3	91.522.638,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.400.000,00		10.225.000,00		10.225.000,00		10.225.000,00		10.225.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1.400.000,00	1	10.225.000,00	1	10.225.000,00	1	10.225.000,00	1	10.225.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				566.991.193,00		814.055.464,00		814.055.464,00		814.055.464,00		814.055.464,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	566.991.193,00	12	814.055.464,00	12	814.055.464,00	12	814.055.464,00	12	814.055.464,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.981.600,00		711.970.000,00		715.970.000,00		715.970.000,00		715.970.000,00		
Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	183.981.600,00	1	711.970.000,00	1	715.970.000,00	1	715.970.000,00	1	715.970.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	40		40		40		40		40			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	10		15		15		15		15			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1		1		1		1		1			

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	1	24.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				146.300.000,00		203.940.000,00		207.940.000,00		207.940.000,00		207.940.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	40	146.300.000,00	40	203.940.000,00	40	207.940.000,00	40	207.940.000,00	40	207.940.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.520.000,00		28.030.000,00		28.030.000,00		28.030.000,00		28.030.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	10	13.520.000,00	15	28.030.000,00	15	28.030.000,00	15	28.030.000,00	15	28.030.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.800,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	80.800,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.800,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	80.800,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	3	175.000.000,00	3	175.000.000,00	3	175.000.000,00	3	175.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				31.677.800,00		238.999.798,00		293.999.798,00		293.999.798,00		293.999.798,00		
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu	85	85	31.677.800,00	85	238.999.798,00	85	293.999.798,00	85	293.999.798,00	85	293.999.798,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 00 - Kecamatan Payakumbu h Utara	
	Persentase usulan Musrenbang yang diterima Perangkat Daerah	75	75		75		75		75		75			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				28.105.900,00		113.427.798,00		143.427.798,00		143.427.798,00		143.427.798,00		
Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	28.105.900,00	1	113.427.798,00	1	143.427.798,00	1	143.427.798,00	1	143.427.798,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				28.105.900,00		113.427.798,00		143.427.798,00		143.427.798,00		143.427.798,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	28.105.900,00	1	113.427.798,00	1	143.427.798,00	1	143.427.798,00	1	143.427.798,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.571.900,00		125.572.000,00		150.572.000,00		150.572.000,00		150.572.000,00		
Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	3.571.900,00	12	125.572.000,00	12	150.572.000,00	12	150.572.000,00	12	150.572.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3.571.900,00		125.572.000,00		150.572.000,00		150.572.000,00		150.572.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	3.571.900,00	12	125.572.000,00	12	150.572.000,00	12	150.572.000,00	12	150.572.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.969.011.223,00		3.264.135.450,00		3.320.135.450,00		3.320.135.450,00		3.320.135.450,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	1.969.011.223,00	100	3.264.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 00 - Kecamatan Payakumbu h Utara	
	Nilai IKM	91	91				91				91			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				120.126.375,00		186.684.750,00		186.684.750,00		186.684.750,00		186.684.750,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27	27	120.126.375,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				120.126.375,00		186.684.750,00		186.684.750,00		186.684.750,00		186.684.750,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27	27	120.126.375,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00	27	186.684.750,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				48.882.850,00		377.450.700,00		433.450.700,00		433.450.700,00		433.450.700,00		
Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	151	2	48.882.850,00	2	377.450.700,00	2	433.450.700,00	2	433.450.700,00	2	433.450.700,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0				1				1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				48.882.850,00		223.882.850,00		223.882.850,00		223.882.850,00		223.882.850,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	151	2	48.882.850,00	2	223.882.850,00	2	223.882.850,00	2	223.882.850,00	2	223.882.850,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-		153.567.850,00		209.567.850,00		209.567.850,00		209.567.850,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	-	1	153.567.850,00	1	209.567.850,00	1	209.567.850,00	1	209.567.850,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM	91	91	1.969.011.223,00	91	3.264.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 01 - Kelurahan Balai Tongah Koto	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.350,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7	200.000.350,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3		3		3		3		3			
	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			98.161.400,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7	98.161.400,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				101.838.950,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	101.838.950,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	1.969.011.223,00	100	3.264.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 02 - Kelurahan Ikua Koto Dibalai	
	Nilai IKM	91	91		91		91		91		91			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				199.999.958,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	199.999.958,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	3		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				71.979.208,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	3	71.979.208,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				128.020.750,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	128.020.750,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM	91	91	1.969.011.223,00	91	3.264.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 03 - Kelurahan Kapalo Koto Dibalai	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.001.980,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	200.001.980,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	6		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				82.629.280,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	6	82.629.280,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117.372.700,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	117.372.700,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM	91	91	1.969.011.223,00	91	3.264.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 04 - Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				199.999.910,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	199.999.910,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	3		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				76.645.910,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	3	76.645.910,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				123.354.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	123.354.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	1.969.011.223,00	100	3.264.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 05 - Kelurahan Napar	
	Nilai IKM	91	91		91		91		91		91			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.100,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7	200.000.100,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				104.784.450,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7	104.784.450,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				95.215.650,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	95.215.650,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM	91	91	1.969.011.223,00	91	3.264.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 06 - Kelurahan Ompang Tanah Sirah	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.060,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	200.000.060,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7				1				1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				68.748.310,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	7	68.748.310,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				131.251.750,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	131.251.750,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Nilai IKM	91	91	1.969.011.223,00	91	3.264.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	91	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0.00.03.00 07 - Kelurahan Tigo Koto Diate	
	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100				100				100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				199.999.605,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	199.999.605,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	6				1				1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				84.499.330,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	6	84.499.330,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115.500.275,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	115.500.275,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 08 - Kelurahan Tigo Koto Dibaruah	
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	1.969.011.223,00	100	3.264.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00		
	Nilai IKM	91	91				91		91					
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.025,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	8	200.000.025,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3				3		3					
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.217.700,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	8	100.217.700,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				99.782.325,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	99.782.325,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	100	100	1.969.011.223,00	100	3.264.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	100	3.320.135.450,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 09 - Kelurahan Taratak Padang Kampung	
	Nilai IKM	91	91				91		91					
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.010,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	200.000.010,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	5				1		1					
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				46.675.110,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	5	46.675.110,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.324.900,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	3	153.324.900,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.270.000,00		83.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	3.270.000,00	100	83.270.000,00	100	108.270.000,00	100	108.270.000,00	100	108.270.000,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 00 - Kecamatan Payakumbu h Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.270.000,00		83.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		
Persentase Kegiatan lingkup Trantib yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	3.270.000,00	1	83.270.000,00	1	108.270.000,00	1	108.270.000,00	1	108.270.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3.270.000,00		83.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		108.270.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	3.270.000,00	1	83.270.000,00	1	108.270.000,00	1	108.270.000,00	1	108.270.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				83.882.200,00		312.881.950,00		372.881.950,00		372.881.950,00		372.881.950,00		
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	100	100	83.882.200,00	100	312.881.950,00	100	372.881.950,00	100	372.881.950,00	100	372.881.950,00	7.01.0.00.0. 00.03.00 00 - Kecamatan Payakumbu h Utara	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				83.882.200,00		312.881.950,00		372.881.950,00		372.881.950,00		372.881.950,00		
Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	2	83.882.200,00	2	312.881.950,00	2	372.881.950,00	2	372.881.950,00	2	372.881.950,00		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1		1		1		1		1			
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				80.258.200,00		249.257.950,00		289.257.950,00		289.257.950,00		289.257.950,00		

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	2	80.258.200,00	2	249.257.950,00	2	289.257.950,00	2	289.257.950,00	2	289.257.950,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3.624.000,00		63.624.000,00		83.624.000,00		83.624.000,00		83.624.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	3.624.000,00	1	63.624.000,00	1	83.624.000,00	1	83.624.000,00	1	83.624.000,00		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payakumbuh Utara				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah pada Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payakumbuh Utara									
2.	Nilai IKM	Indeks	91	91	91	91	91	91	91	
3.	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat	Nilai	80.25	81	81	81	81	81	81	
4.	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK, RT/RW) yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Lainnya Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Payakumbuh Utara										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Payakumbuh 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun mendatang.

Semoga Renstra ini dapat memberi masukan dan sumbangan yang berarti bagi pencapaian tujuan dan cita-cita yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada periode 2025-2029.